



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2025/Periodik - 2024)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : MAHKAMAH SYAR'YIAH ACEH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NILA JANIATI
2. Jabatan : PANITERA
3. NHK : 511364

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 378.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/117 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
2. Tanah Seluas 181 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 42.000.000
3. Tanah Seluas 197 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 56.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 125.750.000

1. MOBIL, SUZUKI AVI414F SDX (4X2) MT / MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 108.000.000
2. MOTOR, HONDA SPACY Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000
3. MOTOR, HONDA F1C02N46L0 AT / SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 6.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 7.677.107

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 517.427.107

**III. HUTANG** Rp. 1.016.846.973

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. -499.419.866

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.